

Model Strategi Pemberdayaan Nahdliyin: dari Jamaah Menuju Kemandirian Ekonomi Studi Kasus di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta

Wasis¹, Sugiyanto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
E-mail: wasis.goses@gmail.com¹, probosugiyanto@gmail.com²

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 02 Juli 2026

Accepted: 07 Juli 2026

Keywords: pemberdayaan ekonomi; Nahdlatul Ulama; modal sosial; pengembangan masyarakat; kolaborasi multipihak; ekonomi berbasis komunitas.

Abstrak: Pemberdayaan ekonomi berbasis organisasi keagamaan semakin dipandang sebagai pendekatan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, kajian mengenai model pemberdayaan yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, modal sosial, dan kolaborasi multipihak masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LPNU DIY) serta merumuskan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang dihasilkannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha mikro, perluasan akses pembiayaan, pengembangan basis data ekonomi jamaah, dan kemitraan lintas sektor. Integrasi strategi tersebut melahirkan Community-Based Nahdliyin Economic Empowerment Model, yaitu model pemberdayaan yang memadukan modal sosial Nahdliyin, tata kelola organisasi, kolaborasi multipihak, dan digitalisasi untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat. Temuan ini memperkaya literatur mengenai pemberdayaan berbasis organisasi keagamaan dan menawarkan model yang adaptif, kolaboratif, serta berpotensi direplikasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya pada tahun 1926 tidak hanya dikenal sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap persoalan ekonomi umat. Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, kesejahteraan ekonomi merupakan bagian integral dari perjuangan keagamaan karena kemiskinan sering kali menjadi akar berbagai persoalan sosial yang menghambat terwujudnya kehidupan masyarakat yang bermartabat (Mustaqim, 2024). Oleh sebab

itu, gerakan ekonomi atau *harakah al-iqtishadiyah* menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan organisasi untuk membangun kemandirian jamaah.

Pemikiran ekonomi NU berangkat dari paradigma bahwa agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Sebagaimana didalam Al-Qur'an:

﴿وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ ٧٧﴾ (القصص/28:77)

Artinya : Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas/28:77)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan urusan ibadah dengan urusan ekonomi. Kehidupan dunia, termasuk aktivitas ekonomi, merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Konsep ini menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari dakwah sosial yang bertujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan ekonomi, praktik monopoli, dan berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat kecil. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh Gus Dur, prinsip kemanusiaan dan keadilan atas hak-hak dasar manusia yang menjadi pondasi utamanya. Hal tersebut menjadi mutlak sebab bagi Gus Dur mengingat Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

Hal tersebut disarikan dalam tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) yakni berupa perlindungan atas hak-hak dasar manusia yaitu hak hidup (*hifdz al-nafs*), hak beragama (*hifdz al-din*), hak profesi (*hifdz al-'irdl*), hak berkeluarga (*hifdz al-nasl*) dan hak kepemilikan (*hifdz al-maal*) tanpa membedakan asal usul, ras, agama dan golongan (Wahyunanto et al., 2021). Dalam konteks tersebut, NU membentuk Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) sebagai instrumen organisasi yang bertugas mengembangkan dan memperkuat ekonomi warga Nahdliyin.

LPNU memiliki peran strategis dalam membangun jaringan usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor perdagangan, koperasi, industri, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kehadiran LPNU tidak hanya dimaksudkan untuk membantu warga NU, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi organisasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi umat. Sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, Yogyakarta memiliki peluang ekonomi yang luas, mulai dari sektor perdagangan, industri kreatif, jasa, hingga pariwisata. Namun di sisi lain, masih banyak warga Nahdliyin yang menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha, seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, minimnya akses pasar, serta ketidakmampuan memanfaatkan teknologi digital secara optimal (Amalia & Jember, 2025).

Melihat kondisi tersebut, LPNU Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi warga NU. Salah satu program unggulannya adalah Toko NU Mandiri (NUMAN), yaitu model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek pendampingan usaha, akses permodalan, digitalisasi, dan pengembangan jaringan ekonomi jamaah. Program ini menjadi representasi nyata bagaimana NU berupaya mentransformasikan jamaah dari objek pembangunan

menjadi subjek utama pembangunan ekonomi (Yogyakarta, 2024).

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program-program ekonomi, tetapi juga oleh strategi yang mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, pengembangan kapasitas masyarakat, akses terhadap sumber daya produktif, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, strategi pemberdayaan ekonomi harus dibangun secara sistematis agar mampu mentransformasikan modal sosial yang dimiliki jamaah menjadi modal ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak lagi dipahami sebatas pemberian bantuan, melainkan sebagai proses membangun ekosistem ekonomi yang memperkuat kapasitas individu, organisasi, dan komunitas secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, LPNU Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan strategi pemberdayaan yang saling terintegrasi melalui penguatan kelembagaan organisasi sebagai fondasi gerakan ekonomi, pengembangan UMKM sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan warga, perluasan akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, penyusunan basis data ekonomi jamaah sebagai dasar perencanaan program berbasis kebutuhan, serta pengembangan kemitraan multipihak dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Kelima strategi tersebut membentuk suatu ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan jejaring ekonomi, dan terwujudnya kemandirian ekonomi Nahdliyin secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana strategi-strategi tersebut diimplementasikan serta berkontribusi dalam membangun model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang dikembangkan oleh LPNU DIY.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana LPNU DIY membangun model pemberdayaan ekonomi yang mampu mengubah potensi sosial keagamaan menjadi kekuatan ekonomi kolektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji program-program yang dijalankan, tetapi juga menelaah strategi, pendekatan, dan nilai-nilai yang melandasi gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2020). Penentuan subyek penelitian dengan teknik *snowball sampling* diawali dengan ketua badan eksekutif dan diakhiri pada anggota. Data dikumpulkan dengan observasi, interview dan studi dokumentasi. Data primer dan data sekunder diintegrasikan dalam konten analisis untuk mendapat data valid (Sugiyanto, 2021), selanjutnya data divalidasi dengan uji derajat kepercayaan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dari uji kepercayaan dilanjutkan dengan uji derajat kepastian atau *comformability* dari seluruh hasil penelitian, dan diakhiri dengan menyajikan hasil penelitian disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi LPNU DIY telah bertransformasi dari pendekatan bantuan ekonomi menjadi pembangunan ekosistem ekonomi berbasis jamaah.

Temuan pertama, menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan menjadi fondasi utama strategi pemberdayaan LPNU DIY. Hasil wawancara dengan Ahmad Rizal, SE., M.Sc.Fin, selaku Ketua Eksekutif LPNU DIY menjelaskan bahwa : *Organisasi terlebih dahulu*

melakukan pembenahan sistem administrasi, memperkuat legalitas lembaga usaha, serta mengembangkan sistem digital sebelum memperluas program pemberdayaan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan perspektif *Institutional Theory* yang menjelaskan bahwa organisasi akan memperoleh legitimasi dan keberlanjutan apabila mampu membangun struktur, aturan, mekanisme kerja, dan tata kelola yang jelas. Kelembagaan yang kuat memungkinkan organisasi meningkatkan akuntabilitas, memperluas jejaring kemitraan, serta memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Abdillah et al., n.d.).

Temuan kedua, pemberdayaan ekonomi berbasis jamaah melalui program NUMAN. Program Toko Jamaah NU Mandiri (NUMAN) merupakan inovasi pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan LPNU DIY dengan pendekatan berbasis komunitas (*community-based economic empowerment*) (Kruahong et al., 2023). Berbeda dengan model pemberdayaan yang hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, NUMAN dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan pelaku UMKM Nahdliyin dengan berbagai sumber daya strategis, seperti akses pembiayaan, jaringan distribusi, pendampingan usaha, pelatihan manajerial, dan digitalisasi pengelolaan usaha melalui kemitraan dengan Bank Mandiri dan TMI Indogrosir. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara desain program dan implementasinya. Sebagian pelaku UMKM belum mampu mengakses pembiayaan karena keterbatasan administrasi dan kelayakan finansial, sehingga akses yang tersedia belum otomatis menjadi kemampuan (*capability*) (Gabriel et al., 2026).

Temuan ketiga, LPNU DIY tidak berhenti pada penyediaan akses permodalan dan perluasan pasar, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) pelaku UMKM sebagai fondasi utama keberlanjutan usaha. Penguatan kapasitas tersebut diwujudkan melalui berbagai program literasi ekonomi, literasi keuangan, pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pencatatan keuangan menggunakan aplikasi Si-Apik, fasilitasi sertifikasi halal, serta penguatan jejaring pemasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa LPNU DIY memandang pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan (*empowerment as capability enhancement*), yaitu membangun kapasitas individu agar mampu mengelola usaha secara mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan, literasi keuangan, dan legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing serta kinerja UMKM (Andriani & Sucipto, 2025).

Temuan keempat, LPNU DIY mengembangkan model pemberdayaan ekonomi berbasis data melalui Survei Ekonomi Jamaah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Survei ini memetakan kondisi sosial-ekonomi warga Nahdliyin, meliputi kepemilikan usaha, pendapatan, akses pembiayaan, kebutuhan pelatihan, dan potensi ekonomi lokal. Hasil pemetaan menjadi dasar penyusunan *Master Plan* Ekonomi Jamaah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat partisipasi dalam pemberdayaan ekonomi (Steiner et al., 2023).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LPNU DIY) berangkat dari visi besar organisasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi jamaah sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan (*jam'iyah*) Nahdlatul Ulama. Visi tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai program strategis yang berorientasi pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), revitalisasi unit usaha organisasi, penguatan jejaring kemitraan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi

usaha, serta pembenahan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LPNU DIY tidak semata-mata bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi Nahdliyin yang mandiri dan berdaya saing.

Secara konseptual, model tersebut dapat dikategorikan sebagai *Community-Based Nahdliyin Economic Empowerment Model*, yaitu model pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam perspektif ini, jamaah Nahdlatul Ulama bukan diposisikan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), melainkan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi potensi, mengembangkan usaha, membangun jaringan ekonomi, dan menciptakan nilai tambah secara kolektif. LPNU DIY menjalankan fungsi sebagai enabler sekaligus facilitator, yaitu membuka akses terhadap pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, hingga penguatan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai transfer bantuan, tetapi sebagai proses transformasi sosial yang meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Model tersebut sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Zimmerman (2000), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun kelompok untuk memperoleh kontrol atas kehidupan, mengambil keputusan, dan memengaruhi lingkungan sosialnya. Senada dengan itu, Perkins dan Zimmerman (1996) menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses partisipatif yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kompetensi, memperoleh akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks LPNU DIY, proses tersebut tampak melalui pelibatan aktif jamaah sejak tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil program. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas organisasi dan lahirnya komunitas usaha yang mampu berkembang secara mandiri.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan LPNU DIY juga memperlihatkan pergeseran paradigma dari model pembangunan konvensional yang bersifat top-down menuju model bottom-up. Pada paradigma lama, masyarakat lebih banyak menjadi objek penerima bantuan yang bergantung pada intervensi pemerintah atau lembaga donor. Sebaliknya, LPNU DIY mengembangkan proses pemberdayaan berbasis kebutuhan riil masyarakat (*need-based approach*) dengan memanfaatkan potensi lokal (*asset-based community development*). Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Kretzmann dan McKnight (1993) yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis aset komunitas, yaitu mengoptimalkan potensi lokal dibandingkan hanya berfokus pada berbagai keterbatasan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi tidak lagi dipahami sebagai pemberian bantuan sesaat, melainkan sebagai investasi sosial untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.

Dalam perspektif Islam, model pemberdayaan yang dikembangkan LPNU DIY memiliki landasan teologis yang kuat. Prinsip pemberdayaan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 1

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۚ﴾ (الرعد/13: 11)

Artinya : Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari

depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra'd/13:11)

Ayat tersebut menegaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi mensyaratkan adanya ikhtiar kolektif dari masyarakat. Perubahan tidak terjadi semata-mata karena bantuan eksternal, melainkan karena adanya kesadaran, partisipasi, dan usaha bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Prinsip inilah yang tercermin dalam strategi LPNU DIY yang lebih menekankan pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan daripada sekadar pemberian bantuan ekonomi. Selain itu, semangat kolaborasi yang menjadi karakteristik model pemberdayaan LPNU DIY juga selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ﴾ (المائدة/5: 2)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, 193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Mā'idah [5]: 2)

Ayat tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan kemitraan multipihak yang dilakukan LPNU DIY. Kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan komunitas menjadi bentuk nyata implementasi nilai ta'awun dalam pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh kekuatan jejaring sosial yang dibangun secara kolektif.

Lebih lanjut, orientasi LPNU DIY dalam membangun kemandirian ekonomi juga sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan kehidupan). Pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM, peningkatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pasar merupakan upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan (*ḥalāl*) tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui terciptanya keadilan distributif, keberkahan usaha, serta kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan model pemberdayaan LPNU DIY dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial (*social capital*) yang telah lama tumbuh dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*network*), nilai gotong royong, dan solidaritas keagamaan menjadi modal utama yang mempercepat proses pemberdayaan ekonomi. Hal ini menguatkan teori Putnam (1993) yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan faktor

penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan masyarakat karena mampu memperkuat kerja sama, memperluas akses terhadap sumber daya, dan meningkatkan partisipasi warga dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, model pemberdayaan ekonomi LPNU DIY tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun tata kelola kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Model ini memperlihatkan integrasi antara nilai-nilai Islam, modal sosial Nahdliyin, pendekatan pemberdayaan partisipatif, dan inovasi kelembagaan modern. Integrasi tersebut menjadi temuan penting penelitian ini karena menghasilkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya relevan bagi lingkungan Nahdlatul Ulama, tetapi juga berpotensi direplikasi oleh organisasi kemasyarakatan Islam lainnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

1. Strategi Pemberdayaan Nahdliyin oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Penguatan Kelembagaan sebagai Fondasi Gerakan Ekonomi

Strategi pertama yang dilakukan LPNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah memperkuat kelembagaan organisasi (*institutional strengthening*). LPNU DIY memandang organisasi sebagai aktor utama dalam menggerakkan transformasi ekonomi warga Nahdliyin. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak semata ditentukan oleh besarnya bantuan modal, banyaknya pelatihan, atau jumlah program yang dilaksanakan, tetapi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam merancang, mengelola, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh proses pemberdayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat utama agar program-program ekonomi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, LPNU DIY melakukan restrukturisasi organisasi melalui pembentukan struktur yang lebih fungsional, pembagian tugas berdasarkan bidang kerja, pembentukan departemen sesuai kebutuhan program, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), digitalisasi sistem administrasi organisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, kaderisasi, dan pendampingan organisasi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi sebagai proses membangun kapasitas organisasi (*organizational capacity building*) sehingga lembaga memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan secara profesional. Hal ini sejalan dengan *Institutional Theory* yang dikembangkan oleh Douglass C. North. North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan "aturan main" (*rules of the game*) yang membentuk perilaku individu maupun organisasi melalui seperangkat aturan formal, norma, dan mekanisme koordinasi. Dalam konteks LPNU DIY, penyusunan SOP, pembagian kewenangan, sistem administrasi, serta mekanisme koordinasi antardepartemen merupakan bentuk institusionalisasi yang bertujuan menciptakan tata kelola organisasi yang lebih efektif.

Organisasi yang memiliki kelembagaan kuat akan mampu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan koordinasi, memperkuat akuntabilitas, serta menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Perspektif ini juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan determinan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat (Bucea-manea-t & Zecheru, 2022). Selain itu, juga dapat dijelaskan menggunakan teori *Dynamic Capability* dari David J. Teece. Teece (2018) menjelaskan bahwa organisasi yang mampu bertahan dalam lingkungan yang dinamis adalah organisasi yang memiliki

kemampuan *sensing*, *seizing*, dan *transforming*. Pada LPNU DIY, penguatan kelembagaan mencerminkan upaya membangun kemampuan organisasi dalam mengenali peluang ekonomi masyarakat (*sensing*), mengembangkan berbagai program pemberdayaan melalui kemitraan (*seizing*), serta melakukan perubahan struktur organisasi, digitalisasi administrasi, dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan (*transforming*).

Dengan demikian, kelembagaan yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi menjadi sumber keunggulan organisasi dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa *dynamic capabilities* berperan penting dalam meningkatkan ketahanan organisasi, inovasi, dan keberhasilan transformasi kelembagaan. Penguatan kelembagaan LPNU DIY juga memperlihatkan praktik *Collaborative Governance* sebagaimana dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash. Dalam model ini, organisasi berfungsi sebagai simpul kolaborasi (*collaborative hub*) yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengurus Nahdlatul Ulama, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, hingga pelaku UMKM. Struktur organisasi yang jelas memungkinkan koordinasi lintas sektor berlangsung lebih efektif, memperkuat pembagian peran, membangun kepercayaan antarpihak, serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghimpun sumber daya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat merupakan faktor utama keberhasilan tata kelola kolaboratif karena mampu membangun kepercayaan, memperjelas mekanisme koordinasi, dan meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan (Ong, 2019).

Dari perspektif *Community-Based Enterprise* (CBE), penguatan kelembagaan menjadi fondasi yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial secara seimbang. Organisasi yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mampu mengembangkan usaha bersama, memperluas akses pembiayaan, membangun jaringan pemasaran, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan aset komunitas. Oleh karena itu, kelembagaan yang kuat tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga memperbesar peluang terciptanya kemandirian ekonomi komunitas secara berkelanjutan.

b. Pengembangan UMKM sebagai Instrumen Pemberdayaan

LPNU DIY memposisikan UMKM sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi warga Nahdliyin melalui pendekatan *capacity building* yang berkelanjutan. Strategi pemberdayaan tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan modal, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta perluasan akses pasar dan jejaring usaha (Nurullaily, 2026). Pendekatan ini sejalan dengan teori *Capacity Building* yang dikemukakan oleh Peter Morgan, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada penguatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu mengelola sumber daya serta beradaptasi terhadap perubahan secara berkelanjutan (Keagamaan, 2023). Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam menciptakan usaha yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Selain itu, fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi halal memperkuat posisi UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan, membangun kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar. Temuan ini didukung oleh penelitian terbaru yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas, legalitas usaha, dan sertifikasi halal

berkontribusi signifikan terhadap daya saing dan keberlanjutan UMKM, terutama ketika diintegrasikan dengan pendampingan yang berkelanjutan dan penguatan ekosistem usaha (Kurniawan et al., 2023).

c. Penguatan Akses Permodalan

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta memandang akses permodalan sebagai salah satu elemen strategis dalam memperkuat keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, organisasi membangun kemitraan dengan lembaga keuangan, seperti Bank Mandiri, guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha Nahdliyin. Melalui kemitraan tersebut, UMKM memperoleh kemudahan akses kredit, pendampingan administrasi, serta pengelolaan keuangan yang lebih baik (Wang et al., 2023). Strategi ini sejalan dengan teori *Resource-Based View (RBV)* dari Jay B. Barney yang menjelaskan bahwa keunggulan organisasi ditentukan oleh kemampuannya memperoleh dan mengelola sumber daya strategis, termasuk modal finansial, pengetahuan, dan jejaring kemitraan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pembiayaan merupakan sumber daya produktif yang memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, dan memperluas pasar. Temuan ini juga didukung oleh teori *Collaborative Governance* dari Chris Ansell dan Alison Gash yang menekankan bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat, sektor perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan melalui penyediaan sumber daya yang tidak dapat dipenuhi oleh satu aktor saja. Dengan demikian, integrasi antara peningkatan kapasitas pelaku usaha dan perluasan akses permodalan membentuk ekosistem pemberdayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin.

d. Pemetaan dan Basis Data Ekonomi Jamaah

Survei Ekonomi Warga Nahdlatul Ulama DIY merupakan inovasi strategis LPNU DIY dalam membangun model pemberdayaan ekonomi berbasis data (*evidence-based empowerment*). Melalui pemetaan kondisi sosial-ekonomi warga, LPNU DIY memperoleh informasi mengenai karakteristik usaha, potensi ekonomi lokal, kebutuhan pembiayaan, serta kapasitas sumber daya manusia yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan *Master Plan* Ekonomi NU DIY. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Evidence-Based Policy* yang dikemukakan oleh Carol H. Weiss, yang menegaskan bahwa kebijakan publik akan lebih efektif apabila dirumuskan berdasarkan bukti empiris dibandingkan asumsi normatif (Steiner et al., 2023). Selain itu, dalam perspektif *Dynamic Capability* dari David J. Teece (2018), kegiatan survei mencerminkan kemampuan organisasi pada tahap *sensing*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, peluang, dan perubahan lingkungan sebagai dasar penyusunan strategi yang adaptif (Mulki & Istiqomah, 2024). Dengan demikian, basis data ekonomi jamaah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi menjadi aset strategis yang meningkatkan ketepatan sasaran program, efisiensi alokasi sumber daya, serta keberlanjutan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep *community needs assessment*, yang menempatkan masyarakat sebagai sumber utama informasi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan program yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

e. Pengembangan Kemitraan Multipihak

Kemitraan strategis merupakan elemen kunci dalam model pemberdayaan ekonomi LPNU DIY. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, serta komunitas ekonomi, LPNU DIY membangun

ekosistem pemberdayaan yang mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan akses pasar bagi pelaku UMKM Nahdliyin. Strategi ini sejalan dengan teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash, yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan publik akan lebih efektif melalui kolaborasi lintas sektor yang dilandasi kepercayaan, komitmen bersama, dan pembagian sumber daya h. Selain itu, dari perspektif *Network Governance*, jejaring kelembagaan memungkinkan terjadinya *knowledge sharing*, inovasi, dan mobilisasi sumber daya yang tidak dapat disediakan oleh satu organisasi secara mandiri (Moloney, 2024). Dalam konteks LPNU DIY, kemitraan tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan akses pembiayaan serta pasar bagi UMKM, tetapi juga menciptakan mekanisme pembelajaran kolektif (*collective learning*) yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, kolaborasi multipihak menjadi modal kelembagaan (*institutional capital*) yang memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh LPNU Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan model pemberdayaan berbasis komunitas (*community-based economic empowerment*) yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, pengembangan UMKM, perluasan akses permodalan, pemetaan ekonomi jamaah berbasis data, serta kemitraan multipihak dalam satu ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Model ini menempatkan warga Nahdliyin sebagai subjek pembangunan yang berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi, mengembangkan usaha, dan membangun jejaring ekonomi kolektif.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan bantuan modal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola kelembagaan, mengembangkan modal sosial, serta menciptakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Integrasi nilai-nilai Islam, semangat *Nahdlatul Tujjar*, pendekatan pemberdayaan partisipatif, dan inovasi kelembagaan menjadikan model pemberdayaan LPNU DIY sebagai praktik baik (*best practice*) dalam pengembangan ekonomi umat. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan Model Pemberdayaan Ekonomi Nahdliyin Berbasis Komunitas (*Community-Based Nahdliyin Economic Empowerment Model*) yang memperkaya kajian pemberdayaan masyarakat berbasis organisasi keagamaan. Model tersebut tidak hanya relevan bagi lingkungan Nahdlatul Ulama, tetapi juga memiliki potensi untuk direplikasi oleh organisasi kemasyarakatan lainnya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, A., Widianingsih, I., Buchari, R. A., Mustari, N., & Saleh, S. (2022). Governance and quintuple helix innovation model: Insights from the local government of East Luwu Regency, Indonesia. *Frontiers in Climate*, 4, Article 1012108. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1012108>
- Amalia, B. (2025). Fintech dan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa: Peran modal sosial Islam dalam mempromosikan inklusi keuangan Islam. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 78–91. <https://doi.org/10.21154/joie.v5i1.10553>
- Andriani, S., & Sucipto, A. (2025). Pendampingan digitalisasi keuangan dengan aplikasi SI APIK

- dan proses produk halal untuk komunitas kopi di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1347>
- Bucea-Manea-Țoniș, R., & Zecheru, T. (2022). Untapped aspects of waste management versus Green Deal objectives. *Sustainability*, 14(18), 11474. <https://doi.org/10.3390/su141811474>
- de Paula Silveira, L., & de Paula, E. V. (2026). Dynamic capabilities erosion: A systematic review, integrative framework, and research agenda. *Futures Business Journal*, 12, Article 100. <https://doi.org/10.1186/s43093-026-00800-1>
- Jurnal Kebijakan Keagamaan. (2023). Religious policy Indonesia: Studi pemodelan kinerja. *Jurnal Kebijakan Keagamaan*, 2, 345–382.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out*. ACTA Publications.
- Kruahong, S., Tankumpuan, T., Kelly, K., Davidson, P. M., & Kuntajak, P. (2023). Community empowerment: A concept analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 79(8), 2845–2859. <https://doi.org/10.1111/jan.15613>
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>
- Moloney, K., & Legrand, T. (2024). Actors, alterations, and authorities: Three observations of global policy and its transnational administration. *Policy and Society*, 43(1), 1–10. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae003>
- Mulki, Y. A., & Istiqomah, N. (2024). The impact of typology capital on community empowerment programs: Evidence from rural development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20083>
- Mustaqim, A. (2024). Ini strategi LPNU kembangkan ekonomi Nahdliyin di Kabupaten Sukabumi. *NU Online Jawa Barat*. <https://jabar.nu.or.id/kabupaten-sukabumi/ini-strategi-lpnu-kembangkan-ekonomi-nahdliyin-di-kabupaten-sukabumi-JBop7>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nurullaily, S. (2026). Model integratif pengaruh sertifikasi halal, literasi keuangan syariah, dan adopsi digital terhadap kinerja dan daya saing UMKM halal di Indonesia. *Jurnal Riset Laboratorium*, 15(1), 1818–1832. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.2131>
- Ong, N. C. H. (2019). Assessing objective achievement motivation in elite athletes: A comparison according to gender, sport type, and competitive level. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 17(4), 397–409. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2017.1349822>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Steiner, A., McMillan, C., & O'Connor, C. H. (2023). Investigating the contribution of community empowerment policies to successful co-production: Evidence from Scotland. *Public Management Review*, 25(8), 1587–1609. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2033053>
- Sugiyanto. (2021). *Tipologi governance lembaga kesejahteraan sosial* (I. A. Permatasari, Ed.). The Journal Publishing.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>

-
- Wahyunanto, E. D., Dwijayanto, A., & Wathoni, S. (2021). Gus Dur dan civil society: Peran KH Abdurrahman Wahid dalam pemberdayaan masyarakat. *Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)*, 1–20.
- Wang, Z., Chen, Z., Xiao, L., Su, Q., Govindan, K., & Skibniewski, M. J. (2023). Editorial. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), Article 100425. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100425>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2
- Zimmerman, M. A., & Perkins, D. D. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Lembaga Perekonomian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Laporan Lembaga Perekonomian PWNu Daerah Istimewa Yogyakarta 2024*.